

## **NAMA PROYEK**

“Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berketahanan Iklim melalui Penerapan Konsep Agrosilvopastura”

## **LATAR BELAKANG**

Pada tahun 2025, Sulawesi Cipta Forum (SCF) memfokuskan upayanya pada penguatan berbagai elemen kunci dan aktor lokal, yaitu Forum Pemerintah Kabupaten, Forum Pemerintah Desa, kader Estungkar, perempuan adat, kelompok orang muda, serta kelompok ekonomi desa. Pendekatan ini bertujuan memaksimalkan pemenuhan hak atas layanan dasar, akses terhadap program sosial, serta manfaat dari berbagai bantuan pemerintah di wilayah kerja program Estungkar.

Dalam ranah kebijakan, SCF mendorong penguatan kelembagaan Forum Pemerintah Kabupaten dan Forum Pemerintah Desa melalui penyusunan dokumen perencanaan RPJMD yang selaras dengan dokumen Renstra OPD. Upaya ini ditujukan untuk mengarusutamakan manfaat layanan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan melalui pengembangan Sekolah Lapang Petani yang menerapkan sistem Agrosilvopastura—pendekatan terpadu yang menggabungkan pertanian, kehutanan, dan peternakan secara berkelanjutan. Sistem ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas lahan, menjaga fungsi ekologi kawasan, serta memperkuat ketahanan masyarakat adat terhadap dampak perubahan iklim.

Selain itu, SCF juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang inklusif, terutama bagi perempuan adat. Hal ini dilakukan melalui pengembangan skema social entrepreneurship yang melibatkan dan mengolaborasikan berbagai lembaga ekonomi desa, seperti BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial), KWT (Kelompok Wanita Tani), dan KMP (Koperasi Merah Putih). Melalui kolaborasi ini, perempuan adat diharapkan menjadi aktor utama dalam rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya alam desa.

Seluruh perencanaan program ini dirumuskan berdasarkan Theory of Action (ToA) untuk periode lima tahun. ToA ini menempatkan penguatan kapasitas kader desa sebagai pilar utama dalam membangun ketahanan komunitas. Oleh karena itu, pengembangan Sekolah Kader menjadi bagian penting dari strategi program. Sekolah ini dirancang untuk memperkenalkan dan mengajarkan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu metode riset yang menempatkan kader sebagai peneliti yang mampu menemukan persoalan desa dan menjadi pelaku perubahan di tingkat lokal. Melalui PAR, kader diharapkan dapat mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta memfasilitasi kehendak perubahan sosial-ekologis berbasis pengetahuan lokal.

Dengan sinergi antara penguatan kapasitas kader, penerapan Agrosilvopastura, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang berpihak pada perempuan adat, proyek ini diharapkan mampu mendorong terpenuhinya hak-hak perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berketahanan iklim, selaras dengan visi program.

## **TUJUAN**

Meningkatkan kapasitas kritis dan teknis kader Estungkara melalui penyelenggaraan Sekolah Kader Estungkara sebagai ruang belajar partisipatif untuk menemukenali persoalan utama komunitas adat.

Memfasilitasi program yang mendukung akses terhadap layanan dasar, partisipasi perempuan, dan kendali atas pengelolaan sumber daya alam melalui dokumen perencanaan kabupaten yang inklusif.

Mendorong kemampuan kader Estungkara dalam melakukan advokasi berbasis data dan riset partisipatif (Participatory Action Research/ PAR) yang melibatkan komunitas secara aktif serta membangun dialog strategis dengan pemangku kepentingan lintas level.

Mewujudkan model pengelolaan sumber daya alam berbasis Agrosilvopastura sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berbasis pengetahuan lokal dan sistem ekologis masyarakat adat.

Memperkuat kontrol dan peran perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui penguatan lembaga ekonomi desa (BUMDesa, KUPS, KWT), agar perempuan adat memiliki ruang dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta menghindari ketergantungan pada sistem ekonomi ekstraktif yang kerap meminggirkan perempuan.

Memfasilitasi integrasi nilai-nilai budaya dan ritual tradisional masyarakat adat dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, agar sistem Agrosilvopastura tidak hanya berdampak ekologis dan ekonomis, tetapi juga sosial dan spiritual. Dengan demikian, pengelolaan lahan tetap terhubung dengan penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari identitas dan kearifan lokal.

## **WILAYAH KERJA**

- Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
- Desa Bontomanung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

## **FOKUS KAMI**

Proyek ini berfokus pada penguatan kapasitas orang muda dan perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis Agrosilvopastura sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Melalui penyelenggaraan Sekolah Kader Estungkara, para kader dilatih untuk memahami isu-isu terkait hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya secara partisipatif, serta mengembangkan keterampilan advokasi berbasis data. Penerapan Agrosilvopastura diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekologi, mendorong diversifikasi penghidupan melalui komoditas seperti kopi robusta, serta memperkuat peran perempuan adat melalui lembaga ekonomi desa, tanpa mengabaikan nilai budaya dan kearifan lokal.

## **MITRA KERJA**

- a. Kabupaten Maros:
  - Pokja Inklusi
  - Koalisi CSO
  - Perguruan Tinggi (melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
- b. Kabupaten Enrekang:
  - Bappeda
  - Dinas Pertanian

- Dinas Peternakan
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
- Dinas Lingkungan Hidup

#### **ANGGARAN**

Rp600.000.000 (Januari–September 2025)

Rp300.000.000 (Oktober–Desember 2025)

#### **DURASI**

Fase 1: Januari – September

Fase 2: Oktober – Desember

#### **DOKUMEN TERKAIT**

[2025 \(Bahagia Selalu\) - Google Drive](#)